

**Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Tahun 2024**

1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	TW 1	25	25	100	<p>Keterangan : Meta indikator tahunan : (Target kinerja sebesar 100% dengan meta indikator sebagai berikut : 1. Meningkatnya PAD (bobot 20%) 2. APBD yang Tepat Waktu dan Akurat (bobot 20%) 3. Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel (bobot 20%) 4. Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akurat (bobot 20%) 5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Konsisten (bobot 20%) = 20%+20%+20%+20%+20%= 100%.</p> <p>Secara kualitatif capaian kinerja pada triwulan I tahun 2024 sebesar 25% dengan formulasi penghitungan sebagai berikut : Meningkatnya PAD (bobot 5%) 2. APBD yang tepat waktu dan akurat (bobot 1%) 3. Laporan keuangan daerah yang akuntabel (bobot 4%) 4. Penatausahaan keuangan daerah yang akurat (bobot 6%) 5. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (bobot 5%), secara kualitatif = 5% + 1% + 8% + 6% + 5% = 25%</p> <p>Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja pada masing-masing indikator dijabarkan sebagai berikut : 1. Meningkatnya PAD dengan bobot kinerja yang dihitung secara kualitatif sebesar 5% Meta indikator meningkatnya PAD, digunakan untuk mengetahui besaran kenaikan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya terhadap tahun berjalan, dihitung dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan (2024) dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya (2023) sbb : Realisasi PAD Pemda pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp 637.449.751.967,71,- sedangkan realiasi PAD Pemda pada triwulan I tahun 2023 sebesar Rp594.623.711.960,55 dengan demikian terdapat kenaikan pada triwulan 1 tahun 2024 dibanding triwulan 1 tahun 2023 sebesar Rp42.826.040.007,16 (secara kualitatif telah tercapai 5%) Upaya yang dilakukan yaitu : a. Penyusunan Regulasi pengelolaan pendapatan daerah sebagai turunan dari Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang c. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah. d. Mendorong penerapan sistem pembayaran pendapatan asli daerah secara nontunai e. Meningkatkan koordinasi, kerja sama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan asli daerah f. Kerjasama dengan institusi di luar lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (unsur Kepolisian dan Jasa Raharja), serta swasta (dealer otomotif) diperlukan dalam rangka ketercapaian PAD yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan.</p> <p>2. APBD yang tepat waktu dan akurat dengan bobot kinerja sebesar 1%. Terkait dengan penganggaran, BPKA telah melakukan tindak lanjut Surat Edaran Sekda DIY Nomor 00.7/664 tanggal 26 Januari 2024 tentang Rasionalisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 dengan melakukan inventarisasi potensi rasionalisasi 2024 terhadap komponen belanja subkegiatan. untuk aktifitas fisik yang telah dilakukan yaitu : a Penggantian Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD TA.2024 dan Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA.2024 b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD TA.2024 c. Koordinasi Penyusunan RKPd Tahun 2025 bersama dengan TAPD d. Publikasi Perda DIY tentang APBD Tahun 2024 dan Pergub DIY tentang Penjabaran APBD Tahun 2024 melalui website.</p> <p>3. Laporan keuangan daerah yang akuntabel dengan bobot kinerja sebesar 8%. Secara umum proses penyusunan LKPD Pemda DIY Tahun 2023 melalui aplikasi SIPD cukup lancar karena aplikasi SIPD 2023 sudah bisa menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan. BPKA selaku konsolidator penyusunan LKPD Pemda DIY melakukan konsolidasi dengan OPD Pemda DIY dalam menyusun LKPD Unaudited. LK Pemda DIY UnAudited 2023 yang sudah diperbaiki sesuai dengan hasil review inspektorat kemudian diserahkan ke BPK. Pada tahun 2024, Pemda DIY menjadi pemerintah daerah setingkat provinsi yang paling awal di Indonesia yang menyerahkan LKPD Tahun 2023 kepada BPK, yaitu pada tanggal 7 Februari 2024. Setelah melakukan pemeriksaan terinci terhadap LKPD UnAudited Pemda DIY tersebut, BPK akan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang akan</p>	<p>Meta indikator : 1. Meningkatnya PAD (bobot 20%) 2. APBD yang Tepat Waktu dan Akurat (bobot 20%) 3. Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel (bobot 20%) 4. Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akurat (bobot 20%) 5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Konsisten (bobot 20%) Secara kualitatif target capaian kinerja tahunan sebesar 100%</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Sasaran)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan per Triwulan	Keterangan
										<p>menjadi dasar opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda DIY. Kemudian pada tanggal 4 April 2024 diselenggarakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD DIY dan Gubernur DIY.</p> <p>Keterangan per Triwulan</p> <p>Upaya yang telah dilaksanakan di triwulan I yaitu :</p> <p>a. Telah dilakukan verifikasi dan pengesahan DPA Pergeseran OPD lingkup Pemda DIY setelah sebelumnya dilakukan pencermatan terhadap usulan pergeseran DPA maupun anggaran kas. Pengesahan/penerbitan DPA Pergeseran diikuti dengan pembuatan dan pencetakan SPD. Untuk tahun 2024 penandatanganan SPD sudah menggunakan tanda tangan elektronik.</p> <p>b. Melaksanakan amanat SE Edaran Sekda DIY Nomor 00.7/664 tanggal 26 Januari 2024 tentang Rasionalisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 dengan menyelenggarakan koordinasi antara TAPD dengan OPD pengusul.</p> <p>c. Melaksanakan penatausahaan keuangan daerah terhadap belanja dan rekonsiliasi pajak Pusat</p> <p>5. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten dengan bobot kinerja sebesar 5%.</p> <p>Upaya yang telah dilakukan di triwulan I yaitu :</p> <p>a. Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota dan ditindaklanjuti dengan penyusunan surat Kepala BPKA DIY perihal permohonan personil tim evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota nomor 100.3.2/2137 tanggal 8 Maret 2024 yang ditujukan kepada OPD-OPD tim evaluasi di Pemda DIY.</p> <p>b. Audit BUKP dalam proses. Sampai dengan triwulan 1 berakhir masih dalam tahap draft laporan audit.</p> <p>c. Penyesuaian dokumen anggaran kas terkait dengan NA dan Raperda Pembentukan PT LKM BUKP dari bulan Mei menjadi bulan September 2024.</p> <p>d. Seleksi administrasi Direksi dan Komisaris PT Tarumartani sudah selesai dilakukan. Saat ini sedang dalam proses assesment di BKD DIY.</p> <p>e. Penyesuaian angkas Dana Bergulir (Pengeluaran Pembiayaan) dari bulan Juni menjadi bulan Mei 2024.</p> <p>f. Pembahasan Peraturan Gubernur tentang Sidur saat ini masih dalam proses di Kemendagri. Harapannya setelah fasilitasi non formal di Kemendagri dapat segera ditetapkan. Disamping itu terdapat beberapa penyesuaian draft pergub dimaksud.</p> <p>Faktor Pendorong :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi yang baik antara OPD yang satu dengan yang lainnya beserta dengan bidang-bidang di BPKA DIY. - Pelaksanaan aktiivitas tetap berpedoman pada dokumen DPA dan anggaran kas yang telah ditentukan. - Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika perubahankebijakan/peraturan di Pusat terkait pengelolaanpendapatan, keuangan danaset daerah 2. Penyusunan Dokumen Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD TA.2024 mengalami penundaan karena terkendala SIPD 	

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Sasaran)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan per Triwulan	Keterangan
						TW 2	54	54	100	Keterangan : - Faktor Pendorong : - Keterangan per Triwulan Keterangan : - Faktor Pendorong : - Faktor Penghambat : -	
						TW 3	72	72	100	Keterangan : - Faktor Pendorong : - Faktor Penghambat : -	
						TW 4	100	100	100	Keterangan : - Faktor Pendorong : - Faktor Penghambat : -	

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Sasaran)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan	Keterangan
2	Optimalisasi aset Pemda DIY	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rupiah	9378609475	2545524976	TW 1	2598841800	2545524976	97.95	<p>Keterangan : Meta Indikator : nilai rupiah optimalisasi barang milik daerah. Realisasi optimalisasi aset Pemda DIY sejumlah Rp2.545.524.976,- berasal dari : a. Retribusi daerah senilai: Rn.115.049.022</p> <p>Keterangan per Triwulan</p> <p>Upaya yang telah dilakukan : .dilakukan perpanjangan perjanjian pemanfaatan rumah dinas a. Dilakukan sewa terhadap BMD idle yang belum dipergunakan untuk tugas dan fungsi OPD b. Pada Triwulan I Tahun 2024 telah dilakukan penjualan BMD berupa kendaraan, bahan bekas bangunan dan penjualan aset lainnya sebanyak 8 kali c. Optimalisasi BMD berupa mall dan hotel yang berada di Jl. Malioboro 52-58 sedang proses konsolidasi dengan PT AMI, yang mana bangunan menjadi satu dengan BMD Pemda DIY (bentuk Perjanjian Kerjasama). Sampai saat ini sudah dilakukan rapat awal dengan panitia pemilihan mitra KSP dan koordinasi untuk memperoleh masukan Tim KSP Pemda DIY</p> <p>Faktor Pendorong : - Penyempurnaan regulasi tentang pemanfaatan barang milik daerah - Koordinasi yang lebih intensif antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam pemanfaatan barang milik daerah (pemanfaatan oleh swasta oleh Pengguna Barang) - Upaya intensifikasi dalam pemungutan dan pengalihan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah</p> <p>Faktor Penghambat : Terdapat banyak peserta lelang yang mendaftar (setor jaminan penawaran), tapi tidak semuanya memasukkan surat penawaran.</p>	Meta indikator : Nilai rupiah optimalisasi Barang Milik Daerah
						TW 2	2930883600	0	0	<p>Keterangan : -</p> <p>Faktor Pendorong : -</p> <p>Faktor Penghambat : -</p>	
						TW 3	3250925400	0	0	<p>Keterangan : -</p> <p>Faktor Pendorong : -</p> <p>Faktor Penghambat : -</p>	
						TW 4	9378609475	0	0	<p>Keterangan : -</p> <p>Faktor Pendorong : -</p> <p>Faktor Penghambat : -</p>	

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Sasaran)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan per Triwulan	Keterangan
3	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	2	2	TW 1	2	2	100	<p>Keterangan : Realisasi triwulan I menggunakan nilai capaian reformasi birokrasi pada tahun 2023, yaitu kategori A dengan nilai 94,41. Untuk nilai capaian reformasi birokrasi pada tahun 2024 akan diketahui di triwulan 4.</p> <p>Keterangan per Triwulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa, peralatan, perlengkapan, pelayanan, dan rapat untuk pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran - Telah menyelesaikan penyusunan laporan kinerja OPD Tahun 2023 (LKjIP, LKPJ dan LPPD), Perjanjian Kinerja Tahun 2024, RKT Tahun 2025, KAK, Logframe, ROPK, Laporan Keuangan unaudited 2023, dan penyusunan Ranwal RKPD 2025 serta laporan monev bulanan sesuai dengan tatakala waktu yang ditetapkan. Selain itu, sesuai dengan tugas fungsi sebagai SKPKD, BPKA juga berkontribusi dalam penyusunan LKPJ dan LPPD Pemda DIY serta RPJPD dan RKPD Pemda DIY. - Telah dilakukan pemenuhan sarana prasarana sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas fusi <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik. 2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana. <p>Faktor Penghambat : Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah</p>	Meta indikator : Nilai Kategori Reformasi Birokrasi; AA=1 (Skor >100) ; A=2 (>80 s.d 100) .; BB=3 (>70-80); B=4. (>60-70); CC=5 (>50-60).; C = 6 (>30-50)
						TW 2	2	2	100	<p>Keterangan : -</p> <p>Faktor Pendorong : -</p> <p>Faktor Penghambat : -</p>	
						TW 3	2	2	100	<p>Keterangan : -</p> <p>Faktor Pendorong : -</p> <p>Faktor Penghambat : -</p>	
						TW 4	2	2	100	<p>Keterangan : -</p> <p>Faktor Pendorong : -</p> <p>Faktor Penghambat : -</p>	